

**DIMENSI POLITIK INDONESIA DALAM PRILAKU SOSIAL
MASYARAKAT
(STUDI EMPERIS KAJIAN POLITIK BERPARTAI, POLITIK
BIROKRASI DAN POLITIK AGRARIS)**

I Dewa Nyoman Usadha¹, Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama²

^{1,2} Universitas Mahendradatta

Email: ¹mahausadha888@gmail.com, ²bimawikrama11@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini menelaah tentang dimensi politik Indonesia dalam perilaku sosial masyarakat. Dimensi politik akan berfokus pada telaah bidang birokrasi, partai politik dan bidang agraris, pertimbangan dimensi ini tidak terlepas dari perilaku sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari sisi birokrasi, manfaat berpartai politik dan kebijakan dibidang ketahanan pangan. Komponen dimensi politik ini secara kontekstual bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kuantitatif dengan mengambil hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Transparency International. Hasil analisis mengkonfirmasi bahwa politik dibidang birokrasi berdasarkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baik, sedangkan survey terhadap perilaku partai politik sangat rendah, buruk dan survey terhadap ketahanan pangan adalah baik.

Kata Kunci: *Politik Birokrasi, Politik parpol dan Politik Agraris berintegritas*

Abstract – *This research examines the dimensions of Indonesian politics in social behavior. The political dimension will focus on the bureaucracy, political parties, and the agricultural sector. Consideration of these dimensions is inseparable from the social behavior of the community, which requires services from the bureaucracy, the benefits of political parties, and policies related to food security. These components of the political dimension are contextually beneficial for social and national life. The analysis used in this study is qualitative and quantitative, drawing on the results of the Public Satisfaction Index (PSI) and the Transparency International survey. The analysis confirms that politics in the bureaucracy is good, based on the public satisfaction index for services, while the survey regarding political party behavior is very low, poor, and the survey regarding food security is good.*

Keywords: *Bureaucratic Politics, Political Party Politics, and Agrarian Politics with Integrity*

PENDAHULUAN

Perilaku politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan sikap diluar tujuan yang diharapkan dalam sistem perpolitikan yang dianut negara negara maju dan telah melek dengan perpolitikan. Di Indonesia politik itu lebih diartikan sebagai sikap asal berbeda dengan lawan politik, menyoroti kelemahan tanpa memberikan solusi, program lawan politik dimata mereka selalu cacat, menjatuhkan lawan dengan mengalalkan segala cara, membuat isu isu tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Politik Indonesia berkembang di era sekarang lebih banyak berorientasi pada kontraprestasi, kontraproduktif tanpa arah positif dari tinjauan perilaku politik orang Indonesia.

Konsep kajian penelitian ini membatasi pembahasan tentang persepsi perilaku politik birokrasi, politik berpartai politik dan politik agraris. Ketiga konsep ini diajukan tidak terlepas dari pengalaman empiris dari perilaku sosial yang terjadi pada bidang kehidupan yang berkaitan pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dasar evaluasi ketiga demensi politik tersebut tidak terlepas dari unsur yang mewakilinya yaitu birokrasi dari lembaga birokrasi, simbol pelayanan publik, situasi politisi dari Lembaga politik dan unsur masyarakat yang menyentuh kebutuhan dasar dari praktek agraris. Fakta di lapangan menunjukkan, fungsi partai politik di Indonesia tidak optimal memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru, banyak kader partai politik terlibat kasus kriminal, bahkan terlibat korupsi setelah mendapatkan kursi jabatan. Partai politik buruk karena kadernya sering bermasalah. Yang terlihat saat ini di Indonesia,

kebanyakan kader politik di Indonesia tersandung masalah korupsi. Bagaimana partai politik menjadi harapan rakyat jika sistem kaderisasinya tidak menciptakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Survei Transparency International pada 2003, 2004, dan 2008 menyebutkan bahwa partai politik menempati posisi kedua setelah parlemen sebagai lembaga paling korup. Fenomena pada partai politik tentang kepuasan masyarakat terhadap partai politik (parpol) di Indonesia cenderung fluktuatif dan umumnya masih rendah. Survei-survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol tidak selalu sejalan dengan kinerja mereka. Masyarakat cenderung lebih menaruh kepercayaan pada figur-figur individu dalam parpol dari pada partai itu sendiri.

Bidang Birokrasi yang dikaitkan dengan pelayanan pada masyarakat juga diduga banyak bermasalah dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam praktek sering terjadi fenomena calo dalam mengurus administrasi perijinan, pembayaran diluar standar normative dibidang perpajakan dan pungutan daerah, serta sering terjadi praktik pungli dan lain sebagainya. Bidang Agraris justru terjadinya ketimpangan dalam kebijakan dan kondisi di lapangan dimana biaya produksi proses olah lahan, rabuk, pestisida tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan misalnya harga gabah rendah, justru harga beras naik. Pembukaan lahan besar besaran justru diberikan kepada pemilik modal (kongloromasi) yang ujung-ujungnya kehidupan para petani stagnan. Kualitas kehidupan para petani masih

rendah dan bahkan masih pada katagori kemiskinan yang akhirnya berdampak pada pola kehidupan yang dulunya Bertani akhirnya beralih ke sektor jasa. Artinya petani banyak meninggalkan ketergantungan hidup bertani atau pun alih profesi ke buruh atau tukang bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat pada praktek politik Birokrasi, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat pada praktek partai politik, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat pada praktek politik agraris?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk evaluasi kinerja parpol, politik agraris kuantitatif pada aspek birokrasi. Analisa partai politik dengan hasil survey yang disebut dengan SIPP(*Survei Transparency International*). SIPP merupakan seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh semua kadernya. Implementasi SIPP diharapkan parpol dapat mencetak calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan Terdapat lima komponen internal dalam SIPP yang sangat penting diperhatikan oleh parpol, antara lain:

a. Kode etik ; Terdapat tiga sistem yang terintegrasi satu sama lain, yaitu penegakan etik, perlindungan, dan standar etik. Penegakan etik adalah lembaga yang memiliki kewenangan independen untuk mengadili

pelanggaran kode etik yang terjadi. Perlindungan yaitu perangkat yang mengatur mekanisme pelaporan kasus pelanggaran etik yang terjadi dan memastikan bahwa pelapor aman dan terlindungi. Sementara standar etik merupakan dokumen kebijakan yang mengatur kode etik serta standar kelaziman. Standar etik inilah yang menjadi dasar apakah anggota parpol telah melakukan pelanggaran atau tidak.

- b. Demokrasi internal parpol ;Partai politik harus menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, melibatkan seluruh anggota, kader, dan pengurus parpol dalam forum musyawarah yang mengagendakan penggantian kepengurusan secara berkala. Selain itu, partai politik harus bisa memastikan bahwa semua anggota memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon pejabat publik. Dan, partai politik bisa memberikan kewenangan pada pengurus daerah untuk mengambil keputusan sendiri tanpa adanya intervensi pusat.
- c. Kaderisasi ;Untuk menciptakan kader partai politik yang berintegritas, partai politik harus menerapkan lima prinsip utama, yaitu:
- d. Inklusif ;Memberi akses yang sama bagi seluruh anggota partai politik mengikuti setiap jenjang kaderisasi yang berlaku di partai
- e. Berjenjang. Kaderisasi harus dilakukan secara berjenjang, dari tingkat pratama, madya, hingga utama
- f. Berkala. Pelaksanaan kaderisasi dilakukan secara periodic
- g. Terukur. Jika terjadi keselarasan antara kurikulum yang diajarkan dengan output kader

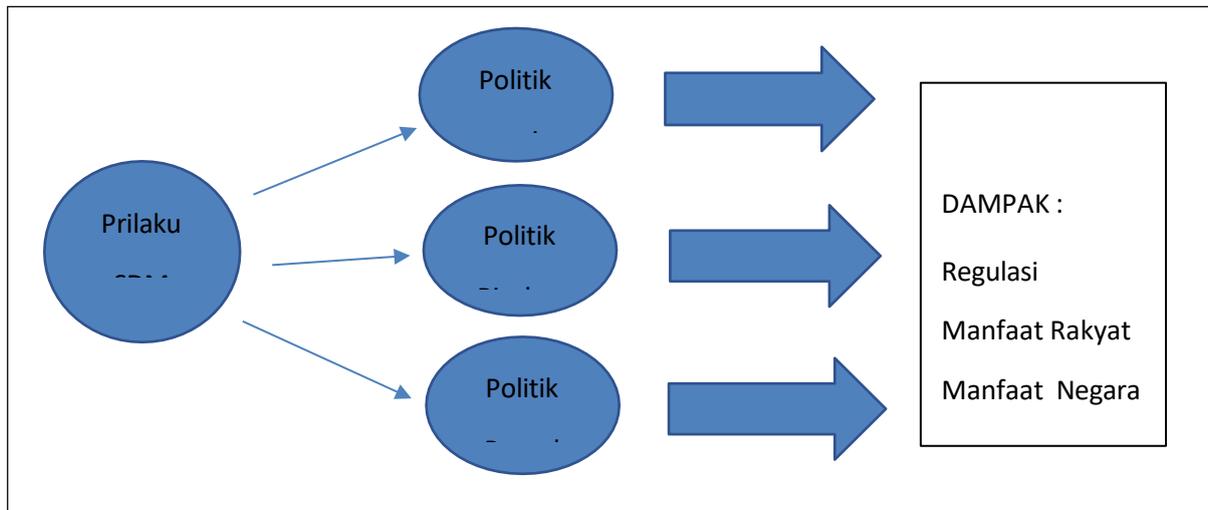
- h. Berkelanjutan. Sistem kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai dan dirancang dengan metode tertentu. Dalam proses menentukan kaderisasi, semua harus berjalan dengan transparan dan adil. Semua anggota kader mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sesuai dengan tingkatannya. Tidak boleh ada kader yang terpilih karena adanya mahar politik. Jika hal ini terjadi, pasti akan menjadi cikal bakal terjadinya korupsi suatu saat nanti.
- i. Rekrutmen ; Proses rekrutmen dalam partai politik harus secara terbuka. Parameter utama yang dijadikan syarat adalah integritas, keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi. Tidak boleh ada rekrutmen yang terjadi karena faktor kedekatan atau kemampuan finansial. Semua anggota partai politik berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Selain itu, setiap partai politik wajib memiliki basis data yang selalu diperbarui secara berkala berisikan jumlah anggota dan kader yang dimiliki
- j. Keuangan parpol ; Dalam Undang-Undang Nomor 2/2011 disebutkan, partai politik wajib membuat laporan keuangan setahun sekali untuk dilakukan audit dan dilaporkan secara publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aliran dana partai politik bersih dari kemungkinan adanya segelintir orang yang menjadi penyumbang dana—ini bisa berimbas ketergantungan partai pada pihak tersebut.
- Penerapan SIPP pada partai politik akan memberikan dampak positif. Partai politik akan menjadi bersih dari perilaku koruptif, semua kader

mendapat kesempatan yang sama, kader-kadernya memiliki jejak rekam baik, dan menularkan budaya politik yang baik ke masyarakat. Dengan begitu, fungsi partai politik di Indonesia bisa berjalan dengan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Birokrasi

Fakta di lapangan menunjukkan, fungsi partai politik di Indonesia tidak optimal memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru, banyak kader partai politik terlibat kasus kriminal, bahkan terlibat korupsi setelah mendapatkan kursi jabatan. SIPP (Survei Transparency International) sebagai dasar penilaian kinerja parpol mencatat data bahwa Partai politik buruk karena kadernya sering bermasalah. Yang terlihat saat ini di Indonesia, kebanyakan kader politik di Indonesia tersandung masalah korupsi. Bagaimana partai politik menjadi harapan rakyat jika sistem kaderisasinya tidak menciptakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Survei Transparency International pada 2003, 2004, dan 2008 menyebutkan bahwa partai politik menempati posisi kedua setelah parlemen sebagai lembaga paling korup. Dengan gambaran seperti, partai-partai politik sudah saatnya dan seharusnya berbenah diri. Salah satunya, menjadikan SIPP sebagai dasar aktivitas berpolitik. SIPP atau Sistem Integritas Partai Politik merupakan salah satu langkah awal KPK dalam menyosialisasikan pengembangan sistem integritas dari internal partai politik. Berikut kerangka pemikiran demensi politik pada gambar 1.



Berdasarkan kerangka berpikir di atas perilaku masyarakat terhadap demensi politik agraris, politik parpol dan politik birokrasi, berdampak pada ketaatan pada regulasi (hukum), manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berkontribusi pada tujuan negara yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur sesuai amanat UU. Penelitian menguji konsep demensi politik dengan revitaliasi yang terjadi di tengah masyarakat apakah mampu menjawab harapan sebagai pelaksanaan regulasi yang tepat, memakmurkan masyarakat dan tujuan bernegara? Hasil Analisis Bidang Birokrasi Bagian I kuesioner diolah dengan menghitung frekuensi jawaban untuk menganalisis profil responden yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, status responden, riwayat dalam mengakses layanan, dan media penyampaian laporan kepada Ombudsman RI. Bagian II kuesioner berupa penilaian responden terhadap unsur-unsur pelayanan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memberikan kode jawaban kuesioner dari setiap responden (tabulasi data kuesioner), dari pertanyaan 1 (U1) sampai dengan pertanyaan n (Un) sesuai urutan dalam kuesioner.

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang

- b. Menentukan bobot nilai rata-rata tertimbang. Dalam penghitungan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: $1 = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah U}}$
- c. Menghitung nilai unsur SKM (nilai rata-rata per unsur) = Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Nilai Unsur SKM = Total Unsur yang Terisi / n
- d. Menghitung nilai SKM (indeks unit pelayanan) Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Nilai SKM berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Nilai SKM dapat dikonversi ke skala 100 dengan mengalikan nilai SKM dengan nilai dasar 25. Nilai Rata-rata Tertimbang = Nilai Unsur SKM * Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang
 Nilai SKM dihitung dengan menjumlahkan semua Nilai Rata-rata Tertimbang tiap unsur: $n \text{ Nilai SKM} = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang})_i$

Bagian III kuesioner berupa saran dan masukan yang diberikan oleh responden berupa data kualitatif diolah dengan analisis sentimen menggunakan anotasi manual dan menarik kesimpulan dari data yang ditampilkan Table Penilaian kepuasan pelayanan public

Uraian	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
∑ Nilai	794	804	692	932	758	775	845	761	873	879
NRR per Unsur	3,16	3,20	2,76	3,71	3,02	3,09	3,37	3,03	3,48	3,50
NRR Tertimbang	0,316	0,320	0,276	0,371	0,302	0,309	0,337	0,303	0,348	0,350
Indek kepuasan	3,23									
Nilai IKM	80,74									
Responden	251									

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, Ombudsman RI melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada layanan penanganan laporan/pengaduan masyarakat di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan. Jumlah responden tahun 2023 yang memenuhi kriteria pernah menyampaikan laporan, menanyakan tindak lanjut laporan, atau konsultasi ke Ombudsman RI adalah 251 orang; dengan rincian 100 responden pada semester I dan 151 responden pada semester II. Nilai SKM tahun 2023 sebesar 3,23 menggambarkan bahwa mutu Layanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Publik adalah “B” dan kinerja unit pelayanan dinilai “Baik”. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan tindak lanjut perbaikan adalah unsur yang mendapatkan nilai di bawah 3,06 yaitu: kecepatan waktu pelayanan (2,76) dan kesesuaian layanan dengan standar layanan (3,02)

Berdasarkan hasil survei, bahkan hanya 2,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat percaya terhadap partai politik 58 persen menyatakan percaya. Sebanyak 30,8 persen menyatakan kurang percaya dan 4,2 persen menyatakan sangat tidak percaya. Sisanya, tidak menjawab atau tidak tahu

Hasil Analisis Tentan Partai Politik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap partai politik (parpol) di Indonesia cenderung fluktuatif dan umumnya masih rendah. Survei-survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol tidak selalu sejalan dengan kinerja mereka. Masyarakat cenderung lebih menaruh kepercayaan pada figur-figur individu dalam parpol daripada partai itu sendiri.

Berikut beberapa poin terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap parpol:

- a. Citra dan kinerja parpol: Beberapa survei menunjukkan bahwa citra dan kinerja partai politik masih menjadi perhatian utama masyarakat. Ada kecenderungan bahwa masyarakat kurang puas dengan kinerja parpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Turunnya kepercayaan: Beberapa hasil survei menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol, bahkan ada yang menempatkan parpol sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah dibandingkan lembaga lainnya.
- c. Fokus pada figur: Masyarakat cenderung lebih fokus pada figur-figur individu dalam parpol daripada partai itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari preferensi pemilih yang seringkali lebih mengarah pada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki citra positif.
- d. Perlu perbaikan: Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi parpol untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerjanya.

- Membangun kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif parpol menjadi hal yang krusial.
- e. Pentingnya pelembagaan: Beberapa pihak juga menyoroti pentingnya pelembagaan partai politik untuk memperkuat demokrasi. Indeks pelembagaan partai politik diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan penguatan partai politik.
 - f. Faktor eksternal: Selain faktor internal partai, faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap parpol. Secara keseluruhan, indeks kepuasan masyarakat terhadap parpol di Indonesia masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Perlu adanya upaya perbaikan dari berbagai aspek, baik dari internal partai maupun faktor eksternal, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi.
- d. Aspek yang Dinilai: IKM ketahanan pangan biasanya mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan, dan keamanan pangan.
 - e. Manfaat IKM: Hasil IKM dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
 - f. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan IKM, yang biasanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat.

Dengan kata lain, IKM ketahanan pangan memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional pada tahun 2024 adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pemerintah menargetkan IKP Nasional akan meningkat dari 76,20 pada tahun 2024 menjadi 80,72 pada tahun 2029.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait IKP Nasional 2024:

Hasil Analisis Bidang Agraris

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap ketahanan pangan adalah ukuran untuk menilai seberapa puas masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan di suatu wilayah. IKM ini dihasilkan dari survei yang mengukur persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terkait ketahanan pangan.

- a. Ketahanan Pangan: Merujuk pada kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan terkait ketahanan pangan.
- c. Tujuan IKM Ketahanan Pangan: Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan harga pangan, dan keamanan pangan.
- a. Target: Pemerintah menargetkan peningkatan IKP Nasional menjadi 80,72 pada tahun 2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat.
- b. Komponen IKP: IKP mengukur tiga komponen utama ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.
- c. Indikator: Berbagai indikator digunakan untuk mengukur ketiga komponen tersebut, seperti ketersediaan pangan (jumlah produksi dan stok), akses pangan (daya beli dan infrastruktur), serta pemanfaatan pangan (pola konsumsi dan status gizi).

- d. Pentingnya IKP: IKP memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan pangan suatu wilayah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pemerintah menargetkan IKP Nasional akan meningkat dari 76,20 pada tahun 2024 menjadi 80,72 pada tahun 2029.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, Ombudsman RI melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada layanan penangan laporan/pengaduan masyarakat di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan menemukan bahwa tindak lanjut laporan ke Ombudsman RI adalah 251 orang; dengan rincian 100 responden pada semester I dan 151 responden pada semester II dengan nilai SKM tahun 2023 sebesar 3,23 yang menggambarkan mutu Layanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Publik adalah "B" dan kinerja unit pelayanan dinilai "Baik". Unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan tindak lanjut perbaikan adalah unsur yang mendapatkan nilai di bawah 3,06 yaitu kecepatan waktu pelayanan (2,76) dan kesesuaian layanan dengan standar layanan (3,02)
2. SIPP atau Sistem Integritas Partai Politik sebagai dasar berpolitik mencerminkan Partai politik buruk karena kadernya sering bermasalah pada kasus korupsi. Survei Transparency International menyebutkan bahwa partai politik menempati posisi kedua setelah parlemen sebagai lembaga paling korup.
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional pada tahun 2024 adalah ukuran yang digunakan untuk menilai

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andrew Vincent dalam Isharyanto, 2016, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Penerbit WR: Yogyakarta.
- Bintang R. Siragih, 1988, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama: Jakarta.
- BN Marbun, 2006, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. C.F Strong, 2015, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nusa Media: Bandung
- Berkman DS, Lescano AG, Gilman RH, Lopez SL, MM B. Effects of Stunting, Diarrhoeal Disease, and Parasitic Infection During Infancy on Cognition in Late Childhood: a Follow-up Study. 2002;359: 564–71. 3.
- Charles Simabura, 2011, Parlemen Indonesia Landasan Sejarah dan Sistemnya, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kotler, P., & Dupree, J. (2017). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, Test Item File. Prentice Hall.
- Proverawati, Atikah, Erna K. Ilmu Gizi Yogyakarta: Medical Book; 2011.
4. Riset Kesehatan Dasar.